



KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

LAPORAN HASIL RAPAT NOMOR : 3/KOM.D/DPRD/2021

I. PENDAHULUAN :

A. DASAR :

Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
19. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II Tahun 2021.

B. TUJUAN :

Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2021 dan 6 Juli 2021 Pukul 09.30 WIB s.d selesai, rapat bertempat di ruang Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT:

Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi D sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Ulin Nuha, S.Pd.I. | : Ketua Komisi D |
| 2. H. Faozan, SH. | : Sekretaris Komisi D |
| 3. Sukarmin | : Anggota Komisi D |
| 4. Badarodin, S.Sos, MA. | : Anggota Komisi D |
| 5. H. Marwan | : Anggota Komisi D |
| 6. H. Danang Saputro, SH. | : Anggota Komisi D |
| 7. Siti Khoiriyah, SE. | : Anggota Komisi D |
| 8. H. Farodli, S.Pd.I. | : Anggota Komisi D |

Sedangkan dari Perangkat Daerah yang hadir sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si | : Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. |
| 2. Ridwan, ST,MM | : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama. |
| 3. Nadhif Alawi, ST,ME. | : Kasi Sarpras SD dan Sekolah Menengah |

2. Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Arif Sudaryanto, S.sos.M.Si | : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. |
| 2. Sri Isyana Dewi kurniati, S.Ag | : Kepala Sub Bagian Program. |

3. Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. dr. Deby Armawati, Sp,M | : Direktur RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak. |
| 2. Titik Lestari, SH,MM | : Kepala Sub Bagian Program |
| 3. Andrew Weko Hartoyo, SE,MM | : Kepala Sub Bagian Keuangan. |
| 4. Sulaiman | : Pelaksana. |

4. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. dr. Ribekan, M.Kes | : Plt. Direktur RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak. |
| 2. Fuad Bactiar, A.Md.Kep | : Kasi Asuhan Perawatan dan Pelayanan Perawatan |

5. Dinas PKM Kabupaten Demak.

1. dr. Haerudin : Kepala Puskesmas Mranggen III
 2. dr. Munarto Tri Cabana : Kepala Puskesmas Demak I
 3. Indah Kusumawati, S.Si.T, SKM, M.Kes : Kepala Puskesmas Bonang II
 4. dr. Eka Novaryanti, D. : Kepala Puskesmas Wedung I
 5. dr. Irene Wahyuni, S : Kepala Puskesmas Karangawen I
- 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.**
1. Guvrin Heru Putranto, SKM, MM : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
 2. Nani Amrin, S.KM, M.Kes : Sekretaris
 3. Imawan Dwi Saputra, S.Kep : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 4. Chandra K : Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
- 7. Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.**
1. Agus Kriyanto, SE, MM : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
 2. Masluroh, S.IP, MM : Kepala Seksi Atraksi Wisata dan Hiburan Umum Kabupaten Demak
 3. Ardhito Prabowo,SH, MM : Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran
 4. Sutomo, S.Sos : Kepala Bidang Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif.
 5. Juweti, S.sos : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.**
1. Drs. Daryanto, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 2. Sukardja.SKM, M.Kes : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 3. Maftukhah Kurniawati, SH, MH : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.**
1. Sri Nastiti Setyaningsih SE, MM. : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.
 2. Mustoriah, S.Hum : Kepala Seksi Akuisisi dan Pelestarian Arsip
 3. Umami Rahmawati, A.Md : Pustakawan Pelaksana Lanjutan (Jabatan Fungsional)
- 10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
1. Drs. Sujarwo, M.Pd : Kepala Bidang Kemitraan dan Informasi
- II.. . Sekretariat DPRD Kab Demak**
1. Rois Subekti, A.Md : Pelaksana
 2. Somat, S.Pd.I : PTT

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil rapat kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI PEMBAHASAN
- III. HASIL PEMBAHASAN
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- V. PENUTUP

II. MATERI PEMBAHASAN :

Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

III. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan

Pagu Anggaran	: Rp 155.747.393.316,-
Realisasi anggaran	: Rp 141.240.650.159,-
Penyerapan Anggaran (Persentase)	: 90.69 %

a. Dengan Rincian Kegiatan

1. APBD Kabupaten Demak

Anggaran	: Rp 37.650.644.600,-
Realisasi Anggaran	: Rp 36.653.588.972,-
Persentase	: 97.35 %

2. DAK NON FISIK BOP PAUD – APBN TK NEGERI NON KPA

Anggaran	: Rp 276.000.000,-
Realisasi Anggaran	: Rp 275.999.800,-
Persentase	: 100.00 %

3. DAK FISIK PAUD – APBN

Anggaran	: Rp 258.281.000,-
Realisasi	: Rp 256.411.000,-
Persentase	: 99.28 %

4. DAK FISIK – DIKDAS – APBN

Anggaran	: Rp 11.633.869.000,-
Realisasi	: Rp 11.345.950.100,-
Presentasi	: 97,53%

5. PROGRAM BOS

Anggaran	: Rp 84.443.679.172,-
Realisasi	: Rp 78.131.711.927,-
Presentasi	: 92,53%

6. DAK FISIK – DIKMAS – APBN

Anggaran	: Rp 1.886.414.000,-
Realisasi	: Rp 1.767.572.760,-
Presentasi	: 93,70%

7. DAK NON FISIK – KEBUDAYAAN – APBN

Anggaran	: Rp 600.000.000,-
Realisasi	: Rp 0,-
Presentasi	: 00,00%

8. SILPA – BANGUB

Anggaran	: Rp 1.941.778.500,-
Realisasi	: Rp 1.930.002.500,-
Presentasi	: 99,39%

9. SILPA DAK FISIK – APBN

Anggaran	: Rp 17.056.709.044,-
Realisasi	: Rp 10.879.413.100,-
Presentasi	: 63,78%

b. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Pengembangan saranaPrasarana.

Pendidikan SD dan SMP ,Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dibiayai dari SILPA DAK sampai dengan tahun 2019, Kegiatan yang di danai dari dana SILPA baru dapat di anggarkan setelah audit BPK selesai. Sehingga baru dapat di akomodasi pada APBD perubahan, karena keterbatasan waktu kegiatan hanya dapat terlaksana 63,78% sisanya akan di luncurkan pada APBD Tahun berikutnya.

2. Urusan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

- Dianggarkan untuk APBD Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 29.186.886.814,-
- Realisasi Anggaran untuk APBD Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 28.625.722.701,-
- Dan untuk penyerapan anggaran APBD Tahun anggaran 2020 sebesar 98,08%

3. Urusan Rumah sakit Sunan Kalijaga

- Dianggarkan APBD Tahun 2020 sebesar Rp 34.617.471.696,-
- Realisasi anggaran untuk APBD Tahun 2020 sebesar Rp 31.238.540.659,-
- Dan untuk penyerapan anggaran APBD Tahun anggaran 2020 sebesar 90,24%

4. Urusan Rumah Sakit Umum Sultan Fatah Kabupaten Demak.

- Dianggarkan Untuk APBD Tahun anggaran 2020 Sebesar Rp 19.766.917.000,-
- Realisasi anggaran untuk APBD Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 15.360.746.941,-
- Dan untuk penyerapan anggaran APBD Tahun anggaran 2020 sebesar 77,71%

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

- Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- Dinas kesehatan melaksanakan 5 program dan 36 kegiatan dengan didukung oleh 30 unit pelaksana Tenis Daerah (UPTD) yang terdiri dari 27 Puskesmas, Labkes dan RSUD Sultan Fatah.
- Capaian Indikator kinerja utama capaian kinerja Tahun 2020.
- Anggaran awal APBD Tahun 2020 sebesar Rp 294.888.104.372,-
- Realisasi anggaran sebesar Rp 266.976.011.906,-
- Penyerapan anggaran 90,53%
- Dalam melakukan kegiatan APBD Tahun anggaran 2020.Terdapat SILPA total anggaran sebesar Rp 27.912.466,- Terbagi:
 - Belanja tidak alangsung :Rp 6.363.716.875,-
 - Belanja langsung :Rp 21.548.375.591,-

Keterangan: SILPA kegiatan bersumber dana dari DAK yang atas kebijakan pusat tidak boleh dilaksanakan (Akreditasi Puskesmas, Kegiatan BOK Puskesmas untuk belanja tenaga promotor di Puskesmas, DAK Jampersal yang biaya persalinan ditanggung BPJS.Sisa kontrak DAK fisik rendahnya pemanfaatan Jaskesda oleh Maskin (Dampak Pandemi Covid-19)

- Dinas kesehatan untuk kegiatan di Tahun 2020 juga melaksanakan kegiatan dalam penanganan pandemic Covid-19 menggunakan dana belanja tidak terduga

(BTT) sebesar Rp 17.698.985.000,- yang diajukan dalam 4 tahap dengan Realisasi Rp 11.265.782.180,- penyerapan anggaran 63,65%.

6. Dinas Pariwisata

1. Dianggarkan untuk APBD Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 9.425.691.580,-
2. Realisasi anggaran untuk APBD Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 9.400.189.295,-
3. Dan untuk penyerapan anggaran APBD Tahun anggaran 2020 sebesar 99,73%

7. Dinas Pembudayaan masyarakat dan Desa, pengendalian pendudukan dan keluarga berencana.

1. Dianggarkan untuk APBD Tahun 2020 sebesar Rp 18.943.003.512,-
2. Realisasi anggaran untuk APBD Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 17.531.445.797,-
3. Dan untuk penyerapan anggaran APBD Tahun anggaran sebesar 92,55%

8. Dinas Perpustakaan dan arsip Kabupaten Demak

1. Dianggarkan awal untuk APBD Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 4.426.499.496,-
2. Realisasi anggaran sebesar Rp 4.109.556.670,-
3. Penyerapan anggaran sebesar 92,84%

Dalam melakukan kegiatan APBD Tahun 2020 terdapat permasalahan dikarenakan:

- a. Rendahnya saran dan prasarana pendukung kegiatan layanan perpustakaan Arsip.
- b. Rendahnya SDM baik secara kuantitas maupun Kualitas.

9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

1. Dianggarkan untuk APBD Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 7.005.759.913,-
2. Realisasi anggaran untuk APBD Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 6.535.257.356,-
3. Dan untuk penyerapan anggaran APBD Tahun anggaran sebesar 93,28%.

10. KESRA (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

1. Jumlah anggaran APBD Tahun 2020 Rp 2.516.297.552,-
2. Realisasi anggaran APBD Tahun 2020 Rp 2.510.345.600,-
3. Penyerapan anggaran APBD Tahun 2020 sebesar 99,76%.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Dinas pendidikan dan kebudayaan. Untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dibiayai dari SILPA . DAK sampai dengan Tahun 2019 akan diluncurkan APBD Tahun 2020. Kegiatan yang didanai dana SILPA baru dapat dianggarkan setelah audit BPK selesai. Sehingga baru dapat diakomodasi pada APBD perubahan karena keterbatasan waktu, kegiatan hanya dapat terlaksana .Penyerapan anggaran 63,78% sisanya akan diluncurkan APBD Tahun berikutnya.
2. Dinas Sosial, Program peningkatan sarana dan prasarana. Aparatur peningkatan kapasitas sumberdaya. Aparatur program pemberdayaan Fakir miskin ,Komunitas data yang terpencil (KAT) dan penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial, Penguatan Kelembagaan

Pengarus tamaan Gender dan Anak,Program Jaminan Sosial,penyerapan anggaran APBD tahaun anggaran 2020 sebesar 98.08 %

3. Ditahun Anggaran tahun 2020 RSUD Sunan Kalijaga

Program:

1. Peningkatan sarana dan proses operator kapasitas sumber daya aparatur, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit, Rumah sakit jiwa/paru-paru/mata.
2. RSUD Sultan Fatah
Program Standarisasi pelayanan kesehatandan program peningkatan pelayanan kesehatan (BLUD) RSUD.

-. ditahun anggaran 2020 perlunya penambahan anggaran untuk penggandaan peralatan medis diruang operasi,semakin melonjaknya pasien sesak napas diperlukan penambahan tabung Oksigen, Pengadaan alat pembuat Oksigen dengan harga persatu yunit senilai Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar) diperhitungkan biaya lebih murah daripada isi ulang tabung tersebut.

3. Dinas kesehatan SILPA kegiatan bersumber dari dana DAK yang atas kebijakan pusat tidak boleh dilaksanakan(Akreditasi Puskesmas, kegiatan BOK Puskesmas untuk belanja tenaga promotor di Puskesmas DAK Jamporsa yang biaya persalinan ditanggung, sisa kontrak DAK fisik rendahnya pemanfaatan Jamkesda oleh maskin(Dampak Pandemi Covid-19) kurang maksimalnya penyerapan SILPA Puskesmas tahun sebelumnya oleh karena penggaran SILPA diperubahan anggaran.

5. Kegiatan APBD Tahun 2020 untuk Dinas pariwisata.Perlunya untuk program pengembangan pemasaran pariwisata,Distinasi pariwisata, pengembangan peningkatan SDM jenis dan paket wisata unggulan.

-. Dinas Perpustakaan diperlukannya penambahan anggaran untuk peningkatan SDM dan pelayanan masyarakat gemar membaca dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pembangunan gudang DPO arsip dan perluasan gudang Perpustakaan.
- b. Pengadaan bahan Perpustakaan (Buku)
- c. Pengadaan saran dan Prasarana pendukung
 1. Layanan Perpus
 2. Save Internet
 3. ALat Transportasi
 4. Tambahan

- 6.-. Dinas Kepemudaan dan olahraga perlunya untuk penambahan pengadaan alat olahraga guna menunjang peningkatan wanprestasi dibidang olahraga di Kabupaten Demak,dan perlunya penambahan dana untuk hadiah/wanprestasi ditahun anggaran 2020 dianggarkan Rp. 150.000.000,terlalu rendah maka perlu penambahan.

-.Dinas Kesra (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Perlunya peningkatan besaran pemberian anggaran hibah ditahun 2020, untuk tempat peribadatan, peningkatan tempat pendidikan,dan agama serta peningkatan tempat kegiatan kegamaan di wilayah Kabupaten Demak.

V. PENUTUP.

Demikian laporan hasil rapat kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.. Semoga bermanfaat untuk peningkatan pembangunan Kabupaten Demak.

Demak, 6 Juli 2021.

**KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

KETUA,


ULIN NUHA, S.Pd.I.

SEKRETARIS,


H. FAOZAN, SH.